

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "*berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat*". Kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah berusaha dengan melakukan pembangunan baik dalam aspek politik, ekonomi, kesehatan maupun pertahanan keamanan. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia ini telah menumbuhkan tantangan serta tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah pembangunan dalam aspek kesehatan.

Dalam kehidupan, kesehatan sangat penting untuk keberlangsungan hidup setiap manusia. Namun di Indonesia, masih menjadi persoalan yang sangat penting bagi pemerintah. Dimana kualitas kesehatan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah bisa dikatakan kurang baik. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada website www.m.cnnindonesia.com yaitu di daerah Papua masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, dikarenakan Papua memiliki topografi yang bervariasi seperti tersebar masyarakat yang bermukim didataran tinggi, dataran rendah, atau lembah sehingga membuat pemerintah sulit mencapai daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Padahal sudah diketahui bahwa seharusnya setiap masyarakat Indonesia mendapatkan haknya sebagai

warga negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Salah satu tugas Pemerintah adalah berupaya dalam meningkatkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dengan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan : *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.

Hal ini juga dipertegas dengan keputusan MPR yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada tanggal 25 november 2011, ditetapkan UU Nomor 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2014.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Hukum, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

yang menyebutkan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik yang berdasarkan Undang-Undang tersebut dan bertanggung jawab kepada presiden. BPJS bergerak dibidang penyelenggara Jaminan Sosial bagi seluruh penduduk di Indonesia. Jaminan sosial yang diberikan berupa asuransi kesehatan. BPJS kesehatan sangat mudah diakses dengan kerjasama rumah sakit yang sangat luas di seluruh Indonesia. Untuk mendukung layanannya, BPJS Kesehatan melayani baik secara langsung melalui kantor dan online melalui website BPJS yang dapat diakses secara online. Pembukaan atau pendaftaran BPJS juga sangat mudah dengan jumlah iuran BPJS Kesehatan yang juga terjangkau.

BPJS Kesehatan memiliki kantor cabang di setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan KC Padang. BPJS Kesehatan KC Padang mempermudah masyarakat kota Padang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Mulai dari pendaftaran kepesertaan sampai pembayaran klaim dan kapitasi ke setiap rumah sakit dan puskesmas. Sistem dana yang dipakai adalah sistem dana terpusat, yaitu segala kegiatan dana yang dilakukan dikirim dari pusat dan akan kembali ke pusat. Contohnya dalam pembayaran iuran peserta, BPJS Kesehatan KC Padang tidak menerima layanan dalam pembayaran iuran, peserta bisa membayarkan iurannya langsung ke bank atau ke kantor pos. BPJS Kesehatan KC Padang memiliki Kantor Layanan Operasional Kabupaten yang tersebar di Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, dan Mentawai.

Untuk kategori kepesertaan pada BPJS kesehatan KC Padang, seperti yang dipaparkan dalam website www.bpjs.go.id, pada BPJS Kesehatan terdapat dua kategori kepesertaan, yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non – PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran). Peserta yang dikategorikan sebagai bukan penerima bantuan iuran

diantaranya Pekerja Bukan Penerima upah dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha. Saat ini telah berlaku sistem pembayaran terbaru bagi peserta BPJS Kesehatan. Terdapat sistem pembayaran VA Keluarga bagi peserta pekerja bukan penerima upah. Adapun bagi peserta pekerja penerima upah badan usaha berlaku sistem pembayaran tertutup (Close Payment System). Bagi peserta yang mendaftarkan dirinya beserta keluarganya sebagai peserta pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah badan usaha, akan dibebankan iuran setiap bulannya. Bagi peserta pekerja bukan penerima upah, iuran yang dibayarkan sesuai dengan hak kelas yang dipilih pada saat awal registrasi. Sedangkan bagi peserta pekerja penerima upah yang didaftarkan oleh perusahaan, dikenakan beban iuran sebesar 5% dari upah bulanan (1% dibayarkan pekerja dan 4% ditanggung oleh perusahaan).

Lalu untuk melakukan klaim, BPJS Kesehatan KC Padang akan mengcover biaya penanganan di rumah sakit apabila memperoleh rujukan dari rumah sakit tersebut atau Faskes Tingkat Lanjutan (FKTL). Selain itu pelayanan kesehatan juga difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti di puskesmas, klinik atau dokter praktek setempat. BPJS Kesehatan KC Padang melakukan kerjasama dengan faskes tingkat I di kelima kabupaten/kota. Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan faskes tingkat I dituangkan dalam perjanjian antara pemilik faskes dengan BPJS Kesehatan. Kerjasama hanya dilakukan dengan faskes-faskes tingkat I yang sesuai dengan kriteria. Faskes tingkat I dan BPJS Kesehatan menentukan tarif-tarif sesuai dengan kriteria pelayanan kesehatan, seperti berapa jumlah dokter umum/dokter gigi, adanya laboratorium, serta adanya fasilitas yang lengkap. Pembayaran yang dilakukan ke faskes tingkat I menggunakan sistem kapitasi.

Dijelaskan dalam pasal 1 angka (6) Perpres No 32 Tahun 2014 bahwa kapitasi adalah suatu metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada faskes tingkat I berdasarkan jumlah peserta, baik peserta berobat atau tidak dalam bulan tersebut tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran kapitasi merupakan salah satu kas keluar pada BPJS Kesehatan KC Padang. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam BPJS itu sendiri, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang salah satunya dalam pembayaran kapitasi ini disusun suatu sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi menurut Wind (2014) adalah suatu sistem untuk mengumpulkan dan memproses data yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan, dan nantinya digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sistem informasi akuntansi yang disusun suatu perusahaan dapat diproses secara manual ataupun dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana samapai dengan komputer. Agar tercapainya suatu sistem informasi akuntansi ini dengan baik maka diperlukan pengendalian internal.

Valery G. Kumaat (2011) menjelaskan pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang ada. Ia mempunyai peran penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan, dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pada BPJS Kesehatan KC Padang pengendalian internal sangat berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sistem informasi akuntansi pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan KC Padang dan penulis menuangkannya dalam tugas akhir yang berjudul **“SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM AKTIVITAS PEMBAYARAN KAPITASI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG PADANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam aktivitas pembayaran Kapitasi pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang ?
2. Bagaimana ancaman dan pengendalian internal dari sistem informasi akuntansi pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan KC Padang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

A. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk sistem informasi akuntansi dalam aktivitas pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui ancaman yang mungkin terjadi serta pengendalian internal dari sistem informasi akuntansi pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

- a) Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang pernah didapatkan semasa perkuliahan di Universitas Andalas
- b) Menambah pengalaman kerja guna meningkatkan keterampilan dan menjalin silaturahmi dan kerja sama antara anggota perusahaan.
- c) Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi jenjang Diploma III Akuntansi Universitas Andalas

2. Bagi kalangan mahasiswa atau akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penilaian dan penulisan selanjutnya terutama dalam sistem informasi akuntansi pada perusahaan/instansi.

3. Bagi perusahaan

Laporan ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memberi informasi tentang kondisi keuangan perusahaannya dan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaannya. Dan dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja Instansi BPJS Kesehatan Cabang Kota. Padang dalam menjalankan kagiataanya terutama pada bagian sistem informasi akuntansi.



4. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai media informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu instansi dianalisis dan dievaluasi berdasarkan sistem informasi akuntansi.

1.4. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang atau kuliah kerja praktek ini dilaksanakan pada perusahaan yang dipilih sendiri oleh mahasiswa. Untuk memperoleh data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan kegiatan magang di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No 52, kota Padang, Sumatera Barat. Dengan kode Pos 25137. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja, yang dimulai dari tanggal 26 Desember 2018 s/d 25 Februari 2019.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian dan analisis yang penulis sampaikan. Yang berisikan tentang pengertian, tujuan, manfaat dan jenis-jenis Sistem Informasi Akuntansi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, penjelasan logo perusahaan, visi dan misi , uraian tugas dan struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang.

BABIV :PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas data dari informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan ,dan dikaitkan dengan analisis sehingga kita dapat mengetahui bagaimana data hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

BABV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan dan juga bermanfaat untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang.